

Public Perceptions And Responses To Politically Nuanced Religious Sermons In Places Of Worship: A Case Study Of Al Mubiin Mosque In Bandar Khalipah Village

Persepsi Dan Respon Masyarakat Tentang Ceramah Agama Bernuansa Politik Di Rumah Ibadah: Studi Kasus Masjid Al Mubiin Di Desa Bandar Khalipah

Thorieq Al Abdu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

email: thorieq0404223037@uinsu.ac.id

Dahlia Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

email: dahlialubis@uinsu.ac.id

Abstract: *Religious sermons in places of worship not only function as a medium for conveying spiritual values but also frequently contain social and political discourses that influence public perceptions. This phenomenon generates various responses among congregants, particularly regarding the boundaries between religious preaching and practical political interests. In this study, politically nuanced religious sermons are defined as religious sermons that relate Islamic teachings to issues of leadership, governance, public policy, and community participation in social life. This study aims to analyze public perceptions and responses toward politically nuanced religious sermons at Al Mubiin Mosque in Bandar Khalipah Village. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and descriptive-analytical conclusion drawing. The findings indicate that the community holds diverse perceptions regarding politically nuanced religious sermons. Some congregants perceive the inclusion of political issues in sermons as a necessary form of moral and social education for the Muslim community, particularly concerning justice, leadership, and public welfare. However, others argue that politically nuanced sermons may potentially create differences in opinion, congregation polarization, and diminish the primary role of the mosque as a center of worship and unity. Community responses are influenced by educational background, level of religious understanding, social affiliation, and the preacher's method of delivering sermons. This study emphasizes the importance of moderate, educational, and non-provocative preaching in maintaining social harmony and preserving the mosque's function as a spiritual space for society.*

Keywords: *Public Perception; Political Sermons; Places Of Worship.*

Abstrak

Ceramah agama di rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian nilai-nilai spiritual, tetapi juga sering memuat wacana sosial dan politik yang memengaruhi persepsi masyarakat. Fenomena ini menimbulkan beragam respon di tengah jamaah, terutama terkait batas antara dakwah keagamaan dan kepentingan politik praktis. Dalam penelitian ini, ceramah agama bernuansa politik dimaknai sebagai ceramah keagamaan yang mengaitkan ajaran Islam dengan isu kepemimpinan, kehidupan bernegara, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan respon masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik di Masjid Al Mubiin, Desa Bandar Khalipah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap ceramah agama bernuansa politik. Sebagian jamaah menilai bahwa penyampaian isu politik dalam ceramah diperlukan sebagai bentuk edukasi moral dan sosial umat, terutama terkait keadilan, kepemimpinan, dan kemaslahatan masyarakat. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa ceramah bernuansa politik berpotensi memunculkan perbedaan pandangan, polarisasi jamaah, serta mengurangi fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah dan pemersatu umat. Respons masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman agama, afiliasi sosial, serta cara penceramah menyampaikan materi ceramah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyampaian dakwah yang moderat, edukatif, dan tidak provokatif guna menjaga harmonisasi sosial dan fungsi masjid sebagai ruang spiritual masyarakat.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat; Ceramah Politik; Rumah Ibadah.*

Pendahuluan

Ceramah agama merupakan salah satu media dakwah yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dalam perkembangan masyarakat modern, materi ceramah di rumah ibadah tidak lagi hanya membahas persoalan ibadah dan akhlak, tetapi juga mulai menyinggung isu sosial, kebangsaan, hingga politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dakwah memiliki posisi strategis dalam

membangun opini publik melalui pendekatan moral dan keagamaan yang mudah diterima masyarakat¹. Oleh sebab itu ceramah agama bernuansa politik menjadi isu yang penting dikaji karena dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan sosial dan kehidupan bernegara.

Pembahasan politik di Indonesia dalam ceramah agama sering memunculkan polemik di tengah masyarakat, terutama pada momentum politik nasional seperti pemilu dan pilkada. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi di Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada pelaksanaan Salat Idulfitri tahun 2019². Dalam peristiwa sejumlah jamaah memilih membubarkan diri ketika khatib menyampaikan ceramah yang dianggap terlalu bermuatan politik. Kronologi kejadian bermula ketika khatib menyinggung persoalan partai politik Islam dan kondisi politik nasional dalam khutbah Idulfitri. Sebagian jamaah merasa isi khutbah tidak sesuai dengan suasana ibadah sehingga mereka meninggalkan lokasi salat sebelum khutbah selesai. Video kejadian tersebut kemudian viral di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan masyarakat mengenai batas penyampaian politik dalam ceramah agama. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ceramah agama dapat menjadi ruang yang sensitif ketika materi yang disampaikan berkaitan dengan pilihan politik dan kepentingan kelompok tertentu.

Polemik ceramah agama bernuansa politik juga muncul pada beberapa momentum politik nasional lainnya. Pada Pemilu 2024, ceramah tokoh publik di sejumlah masjid sempat menjadi perdebatan karena dianggap mengandung unsur kampanye politik dan politik identitas³. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah ibadah sering berada dalam posisi yang rentan terhadap munculnya perbedaan

¹ Erwan Tri Efendi, "Pola Dan Strategi Dakwah Dalam Moderasi Beragama," *Da'watuna* 3, no. 2 (2023): 709–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2766>.

² Michael Hangga Wismabrata, "Fakta Di Balik Ceramah Politik Saat Shalat Idul Fitri, Dipanggil Polres Dan Kodim Hingga Minta Maaf," Kompas TV, 2019.

³ Yoan Colina, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Politisasi Agama Pada Pemilu 2024," *Journal of Religious Policy* 3, no. 2 (2024): 277–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.44>.

pandangan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap pembahasan politik dalam ceramah sebagai bentuk pendidikan moral umat, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa rumah ibadah seharusnya difokuskan pada penguatan spiritual dan persatuan jamaah. Perbedaan pandangan tersebut menjadikan isu ceramah agama bernuansa politik tetap relevan untuk diteliti dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Bandar Khalipah.

Perbedaan respons masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik diduga berkaitan dengan berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pengalaman sosial, pemahaman agama, dan afiliasi politik jamaah sehingga harus diteliti. Sebagian masyarakat memandang bahwa pembahasan politik dalam ceramah diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral umat dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa pembahasan politik di rumah ibadah berpotensi memunculkan konflik sosial dan perpecahan di tengah jamaah apabila disampaikan secara provokatif⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ceramah agama bernuansa politik tidak selalu diterima secara sama oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan cara masyarakat memaknai pesan dakwah yang disampaikan.

Masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan umat Islam juga memiliki fungsi sosial yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi tempat ibadah, masjid sering dijadikan ruang pendidikan, pembinaan moral, dan diskusi sosial masyarakat. Wahidin Saputra menjelaskan bahwa dakwah tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap realitas kehidupan⁵. Oleh sebab itu, pembahasan isu sosial dan politik dalam ceramah agama sering dianggap sebagai bagian dari fungsi dakwah dalam merespons dinamika masyarakat. Dalam konteks tertentu, masjid bahkan menjadi ruang pembentukan opini

⁴ Muhammad Hafidz Ilmi and Muhammad Torieq Abdillah, "Mu A's Arah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Fenomena Politisasi Mesjid Tinjauan Political Process Theory" 5, no. 2 (2023): 75–84, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i2.11884>.

⁵ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

sosial karena masyarakat menjadikan ceramah agama sebagai sumber rujukan moral dalam memahami persoalan kehidupan.

Ceramah agama bernuansa politik juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya polarisasi jamaah. Ketika materi ceramah disampaikan dengan bahasa yang cenderung memihak kelompok tertentu atau bernada provokatif, masyarakat dapat memberikan respons yang berbeda sehingga memunculkan ketegangan sosial di lingkungan jamaah. Menurut Anwar Arifin, komunikasi politik memiliki kemampuan memengaruhi cara pandang masyarakat melalui simbol, bahasa, dan pesan yang disampaikan secara terus-menerus⁶. Dalam konteks dakwah, kemampuan retorika penceramah sangat menentukan bagaimana jamaah memahami isi ceramah yang disampaikan. Makanya penyampaian ceramah agama yang berkaitan dengan politik memerlukan pendekatan yang moderat agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara dakwah dan politik merupakan fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat Muslim modern. Penelitian Cecep Suryana menjelaskan bahwa komunikasi politik dalam dakwah dapat membentuk kesadaran sosial masyarakat terhadap persoalan tertentu⁷. Masjid juga saat ini berkembang menjadi ruang representasi publik yang memiliki fungsi sosial yang luas di tengah masyarakat. Penelitian Ahmad Taufik Alvino menegaskan bahwa keberhasilan dakwah sangat dipengaruhi oleh kemampuan penceramah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan jamaah⁸. Meskipun penelitian mengenai dakwah dan politik telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas persepsi dan respon masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik pada lingkungan masjid tingkat lokal masih relatif terbatas.

Masjid Al Mubiin di Desa Bandar Khalipah dipilih sebagai lokasi penelitian karena masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat

⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

⁷ Cecep Suryana, "Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. April (2021): 41–58, <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12646>.

⁸ Miftakhul Fikri and Hajidah Fildzahun Nadhilah K, "Masjid Sebagai Ruang Representasi Publik: Kajian Tentang Praktik Sosial Dan Pemberdayaan Umat," *Jurnal Dakwah* 23, no. 1 (2022).

pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat masyarakat berinteraksi dan memperoleh berbagai informasi keagamaan maupun sosial. Selain itu, masyarakat di Desa Bandar Khalipah bersifat plural dengan keberagaman etnis yang signifikan, meliputi etnis Jawa: 16.968 jiwa (41,67%), Melayu: 12.530 jiwa (30,77%), Mandailing: 9.855 jiwa (24,19%), Aceh, Karo, dan lainnya: 1.371 jiwa (3,37%)⁹, yang menyebabkan perbedaan latar belakang budaya, pemahaman keagamaan, dan pandangan politik dalam menanggapi ceramah agama bernuansa politik. Keberagaman etnis ini menjadikan masyarakat di sekitar Masjid Al Mubiin menarik untuk dikaji karena masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap ceramah agama bernuansa politik, terutama ketika materi ceramah menyinggung isu politik identitas atau kepemimpinan daerah. Di samping itu, ceramah agama bernuansa politik sudah mulai banyak dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat dalam 2 tahun terakhir (2024-2025), dengan terdapatnya peningkatan frekuensi ceramah yang membahas isu politik nasional, pemilu, kebijakan pemerintah, sehingga menjadikan Masjid Al Mubiin sebagai lokasi yang representatif untuk mengobservasi bagaimana jamaah dan masyarakat sekitar mempersepsikan serta merespon penyampaian isu politik dalam ceramah agama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan dan respon masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik di Masjid Al Mubiin serta memahami bagaimana masyarakat memaknai fungsi ceramah agama dalam kehidupan sosial keagamaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus¹⁰. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai persepsi dan respon masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik di Masjid Al Mubiin Desa Bandar Khalipah. Penelitian dilakukan secara langsung pada lingkungan sosial masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana jamaah memaknai ceramah agama yang mengandung unsur sosial dan politik dalam kehidupan keagamaan

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, "Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2024" (Deli Serdang, 2024), BPS Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2024.

¹⁰ Salsabila, 2025.

mereka. Pendekatan studi kasus digunakan agar peneliti dapat memahami fenomena penelitian berdasarkan konteks sosial yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan terperinci. Dalam proses penggalian data, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu berupaya memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan subjektif informan terhadap fenomena ceramah agama bernuansa politik yang mereka alami. Pendekatan fenomenologis digunakan sebagai cara memahami pengalaman hidup informan, sedangkan studi kasus tetap menjadi jenis penelitian yang memfokuskan kajian pada konteks Masjid Al Mubiin di Desa Bandar Khalipah.

Subjek penelitian terdiri dari jamaah Masjid Al Mubiin, Badan Kemakmuran Masjid Al-Mubiin, Kepala Dusun VII Desa Bandar Khalipah, dan masyarakat desa Bandar Khalipah yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam mengikuti kegiatan ceramah agama di rumah ibadah khususnya di masjid Al Mubiin. Informan penelitian meliputi pengurus masjid, tokoh masyarakat dan jamaah masjid yang pendidikan terakhirnya minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengannya, dan mempertimbangkan pandangan masyarakat agar data yang diperoleh dapat menggambarkan variasi persepsi dan respon jamaah terhadap ceramah agama bernuansa politik. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu persepsi masyarakat mengenai makna ceramah agama bernuansa politik dan respon masyarakat terhadap penyampaian ceramah tersebut di rumah ibadah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi¹¹. Observasi awal telah dilakukan oleh peneliti pada bulan tanggal 3 Mei 2026 di Masjid Al Mubiin, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat observasi berlangsung, ceramah agama disampaikan oleh Ustadz Eri Yanto yang menyinggung tentang pemimpin yang amanah. Peneliti mengidentifikasi adanya nuansa politik dalam ceramah tersebut karena penceramah mengaitkan nilai-

¹¹ Nur Intifada Zahroh, Lusy Amelia Nasution, and Aulia Dzulfa Tazqia, "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.

nilai kepemimpinan islam, dan tanggung jawab umat memilih pemimpin adil dan amanah. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi kegiatan ceramah agama. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik, termasuk bagaimana masyarakat memahami batas antara dakwah keagamaan dan pembahasan politik dalam ceramah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti foto, serta informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ceramah agama di Masjid Al Mubiin.

Persepsi dalam penelitian ini mengacu pada definisi menurut KBBI dan ilmu psikologi, yaitu proses, cara, atau tindakan seseorang untuk mengenali, menafsirkan, dan memberi makna terhadap sesuatu melalui indra dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat didefinisikan sebagai pemahaman atau penafsiran masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan "ceramah agama bernuansa politik", yaitu bagaimana masyarakat mengenali dan mengategorikan suatu ceramah sebagai ceramah yang mengandung unsur politik atau tidak. Sementara itu, respon menurut KBBI adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban terhadap suatu rangsangan atau situasi. Dalam penelitian ini, respon masyarakat didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap penyampaian ceramah agama bernuansa politik, baik dalam bentuk persetujuan, penolakan, apresiasi, maupun kritik terhadap isi ceramah tersebut.

Pengukuran persepsi dilakukan dengan menilai apakah responden memiliki pemahaman yang sama atau berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan ceramah agama bernuansa politik. Persepsi dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu responden yang menganggap ceramah tersebut bernuansa politik dan responden yang tidak menganggapnya bernuansa politik. Kategori ini didasarkan pada pemahaman responden terhadap unsur-unsur politik dalam ceramah, seperti penyebutan nama tokoh politik, partai politik, atau kandidat pemilihan, pembahasan isu kebijakan pemerintahan atau politik praktis, ajakan memilih atau mendukung pihak tertentu dalam kontestasi politik, kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara, serta penggunaan bahasa atau simbol yang identik dengan kampanye politik. Karena setiap individu dapat memiliki penilaian berbeda terhadap isi ceramah berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan

pemahaman keagamaan, penelitian ini akan mengidentifikasi variasi persepsi tersebut dengan mencatat apakah setiap responden menganggap ceramah mengandung unsur politik atau tidak.

Pengukuran respon masyarakat dilakukan dengan menilai bentuk tanggapan terhadap ceramah agama bernuansa politik, yang dikategorikan sebagai respon positif atau respon negatif. Respon positif ditunjukkan melalui penerimaan masyarakat terhadap pembahasan politik dalam ceramah sebagai bagian dari edukasi sosial dan moral, dengan indikator konkret berupa pernyataan setuju atau sepakat dengan isi ceramah, pemberian apresiasi atau pujian kepada penceramah, mengikuti diskusi lanjutan setelah ceramah selesai, penyampaian bahwa materi ceramah bermanfaat untuk kehidupan sosial, serta tidak merasa terganggu dengan adanya pembahasan politik dalam ceramah. Respon negatif ditunjukkan melalui ketidaksetujuan masyarakat terhadap penyampaian isu politik di rumah ibadah, dengan indikator konkret berupa pernyataan tidak setuju atau menolak isi ceramah, pengkritikan terhadap penceramah atas penyampaian materi politik, penyampaian ketidaknyamanan atau keberatan terhadap konten ceramah, pernyataan bahwa masjid seharusnya tidak digunakan untuk membahas politik, serta penghindaran atau tidak mengikuti ceramah berikutnya.

Secara teoritis, ada hubungan antara persepsi dan respon. Persepsi sebagai proses penafsiran terhadap suatu stimulus akan mempengaruhi bagaimana seseorang merespon stimulus tersebut¹². Dalam konteks penelitian ini, jika seseorang memiliki persepsi bahwa ceramah tersebut bernuansa politik, maka kemungkinan besar ia akan memberikan respon negatif karena menganggap masjid tidak seharusnya digunakan untuk membahas politik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki persepsi bahwa ceramah tersebut tidak bernuansa politik atau menganggap politik yang dibahas adalah politik kebangsaan yang bermanfaat, maka kemungkinan besar ia akan memberikan respon positif karena menganggap materi tersebut edukatif dan bermanfaat.

¹² Fabiano Christian Adolf Kontu, Richard Luas, and Prishicha Tumewu, "Interaksi Antara Sensasi Dan Persepsi Dalam Pembentukan Pengalaman Manusia Di Lingkungan Sekitar," *About Padamara: Jurnal Psikologi Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2026).

Analisis hubungan antara persepsi dan respon dilakukan dengan membandingkan apakah tipe persepsi seseorang berhubungan dengan jenis respon yang ditunjukkan¹³. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kategori persepsi setiap informan, yaitu apakah menganggap bernuansa politik atau tidak menganggap bernuansa politik, kemudian mengidentifikasi kategori respon setiap informan, yaitu positif atau negatif, dilanjutkan dengan membuat tabel silang atau *cross-tabulation* untuk melihat pola keterkaitan antara persepsi dan respon, serta mengidentifikasi pola hubungan yang dominan. Pola hubungan yang akan dicari antara lain apakah responden yang menganggap ceramah bernuansa politik cenderung memberikan respon negatif, apakah responden yang tidak menganggap ceramah bernuansa politik cenderung memberikan respon positif, dan apakah ada variasi respon yang berbeda meskipun persepsinya sama. Hubungan ini dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola keterkaitan antara kategori persepsi dan kategori respon dari setiap informan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah positif atau negatifnya respon masyarakat berhubungan dengan persepsi mereka¹⁴ dalam menilai apa itu ceramah agama bernuansa politik.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-data lebih mudah dipahami. Peneliti menganalisis keterkaitan antara persepsi masyarakat mengenai ceramah agama bernuansa politik dengan respon yang ditunjukkan oleh jamaah terhadap ceramah tersebut. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan kualitatif

¹³ Salsabilah Tri Setianingrum, "Persepsi Masyarakat Tentang Komunikasi Yang Berdampak Pada Kinerja Organisasi Di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi" (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, 2025), <http://repository.stimbudibakti.ac.id/id/eprint/158>.

¹⁴ Muhammad Avrizar, "Kecamatan Pasar Kemis Tentang Aplikasi Gojek Yang Dipergunakan Sebagai Media Berselingkuh" 1, no. 2 (2023).

dengan jenis penelitian studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena dalam konteks sosial yang nyata¹⁵.

Pembahasan

Fenomena Ceramah Agama Bernuansa Politik di Masjid Al Mubiin

Ceramah agama di Masjid Al Mubiin Desa Bandar Khalipah menunjukkan bahwa rumah ibadah tidak hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai ruang penyampaian pesan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kegiatan khutbah dan kajian, materi ceramah terkadang menyinggung persoalan kepemimpinan, keadilan sosial, tanggung jawab memilih pemimpin, hingga partisipasi umat dalam kehidupan bernegara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dakwah memiliki hubungan yang cukup erat dengan dinamika sosial masyarakat modern, terutama ketika isu politik menjadi bagian dari pembahasan moral keagamaan¹⁶.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa ceramah agama bernuansa politik memang pernah disampaikan di Masjid Al Mubiin, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu dan pilkada. BKM Masjid Al Mubiin, Pak Indra Fahmi Nasution, menjelaskan bahwa pembahasan politik biasanya berkaitan dengan pentingnya memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai ajaran Islam. Ia menilai bahwa politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat karena menyangkut persoalan moral dan kemaslahatan masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengurus masjid memandang ceramah politik sebagai bagian dari edukasi sosial keagamaan selama tidak mengarah pada kampanye politik praktis¹⁷.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Bandar Khalipah, Pak Samidi, yang menilai bahwa ceramah bertema politik dapat membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang baik dan menghindari praktik politik uang.

¹⁵ Iin Salsabila et al., "Desain Penelitian Studi Kasus.," *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika* 3, no. 3 (2025): 245–54, <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i3.1937>.

¹⁶ Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*.

¹⁷ Indra Fahmi Nasution, "Wawancara Dengan Pak Indra Fahmi Nasution" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

Menurutnya, sebagian masyarakat desa masih memiliki tingkat literasi politik yang rendah sehingga ceramah agama menjadi salah satu media yang mampu memberikan pemahaman moral mengenai politik yang sehat¹⁸. Pernyataan ini sejalan dengan fungsi dakwah sebagai transformasi sosial, di mana ceramah tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran agama secara normatif tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap realitas kehidupan bernegara¹⁹.

Persepsi Masyarakat terhadap Ceramah Agama Bernuansa Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik cenderung beragam. Sebagian jamaah menganggap bahwa pembahasan politik dalam ceramah merupakan hal yang wajar selama disampaikan dalam bentuk nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi sebagian jamaah lainnya memandang bahwa politik identik dengan kepentingan kekuasaan sehingga tidak layak dibahas di rumah ibadah²⁰. Perbedaan persepsi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki cara penafsiran yang berbeda terhadap isi ceramah berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan pemahaman keagamaan masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam teori persepsi bahwa individu secara aktif memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimulus berdasarkan kerangka pengalaman yang dimilikinya.

Jamaah bernama Buk Lisma menyatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar ceramah yang secara terang-terangan mengarah pada kampanye politik atau dukungan terhadap partai tertentu, namun ia mengakui bahwa ada beberapa ceramah yang secara tidak langsung menyinggung persoalan politik nasional. Menurutnya, pembahasan politik di masjid diperbolehkan selama bertujuan memberikan pengetahuan kepada umat dan tidak digunakan untuk mencari dukungan politik praktis. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa

¹⁸ Samidi, "Wawancara Dengan Pak Samidi" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

¹⁹ Surpani and Rumadi, "Dinamika Politik Islam Di Indonesia," *Dialektika Publik*, 2024.

²⁰ Arifin, *Komunikasi Politik Indonesia*.

sebagian masyarakat masih dapat menerima pembahasan politik apabila disampaikan secara proporsional dan tidak partisan²¹.

Sementara informan bernama Wisnu mengaku pernah mendengar ceramah yang membahas bahaya memilih pemimpin yang tidak memahami agama. Ia menilai bahwa isi ceramah tersebut cukup baik karena mendorong masyarakat untuk aktif dalam kehidupan politik dan tidak bersikap apatis terhadap pemilu. Namun demikian, ia juga merasa bahwa beberapa pernyataan penceramah cenderung condong pada kelompok tertentu sehingga perlu disikapi secara kritis²². Sikap kritis Wisnu ini mencerminkan pola respon yang tidak sepenuhnya positif maupun negatif, melainkan bersifat selektif, di mana jamaah menerima substansi ceramah tetapi menolak cara penyampaian yang dianggap tidak berimbang.

Berbeda dengan beberapa informan sebelumnya, jamaah bernama Al Fred memiliki persepsi yang cenderung negatif terhadap ceramah agama bernuansa politik. Ia secara tegas menyatakan bahwa politik selalu identik dengan kepentingan dan perebutan kekuasaan, sehingga begitu politik masuk ke masjid maka suasana ibadah sudah berubah dan tidak lagi murni. Menurutnya, masjid adalah tempat ia datang untuk tenang dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendengar urusan kekuasaan. Ia juga mengkhawatirkan bahwa masjid pada akhirnya hanya akan menjadi alat untuk meraih kekuasaan tertentu meskipun dibungkus dengan ayat-ayat agama, dan karena itu ia secara konsisten menolak ceramah bernuansa politik di rumah ibadah²³.

Perbedaan persepsi antara informan yang menerima dan menolak ceramah politik ini dapat dipahami melalui kerangka teori *stimulus-respon*, di mana stimulus yang sama yaitu ceramah agama bernuansa politik dapat menghasilkan respon yang berbeda tergantung pada kondisi internal individu yang menjadi perantara antara stimulus dan respon tersebut. Individu yang memiliki pengalaman positif terhadap politik dan pemahaman keagamaan yang

²¹ Lisma, "Wawancara Dengan Buk Lisma" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

²² Wisnu, "Wawancara Dengan Bang Wisnu" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

²³ Al Fred, "Wawancara Dengan Bang Al Fred" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

luas cenderung memaknai ceramah politik sebagai edukasi, sedangkan individu yang memiliki pengalaman negatif atau memandang politik sebagai sesuatu yang kotor cenderung memaknainya sebagai ancaman terhadap kesucian rumah ibadah²⁴.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi masyarakat sangat memengaruhi bentuk respon yang diberikan terhadap ceramah agama bernuansa politik. Jamaah yang memandang ceramah politik sebagai bentuk pendidikan moral cenderung memberikan respon positif, sedangkan jamaah yang menganggap politik identik dengan konflik lebih banyak memberikan respon negatif²⁵. Untuk melihat pola keterkaitan tersebut secara lebih sistematis, berikut disajikan tabel silang antara kategori persepsi dan kategori respon masing-masing informan:

Tabel 1. Cross-Tabulation Persepsi dan Respon Informan

Informan	Persepsi	Respon
Pak Indra Fahmi Nasution (BKM)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif
Pak Samidi (Kadus)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif
Prof. Arifinsyah (Ustadz)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif
Buk Lisma (Jamaah)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif
Bang Wisnu (Jamaah)	Menganggap bernuansa politik	Positif bersyarat
Bang Al Fred (Jamaah)	Menganggap bernuansa politik	Negatif
Bang Putra Ramadhan (Jamaah)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif
Bang Ilham Ilyas (Jamaah)	Tidak menganggap bernuansa politik negatif	Positif

Dari tabel di atas tampak bahwa mayoritas informan yang tidak menganggap ceramah bernuansa politik dalam pengertian negatif

²⁴ M Fahri Harahap and Marzuki Manurung, “Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik : Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3495–3503.

²⁵ D I Kumun Mudik, “Persepsi Masyarakat Terhadap Humor Dalam Ceramah Juru Dakwah Di Kumun Mudik,” *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 29–50.

cenderung memberikan respon positif. Satu-satunya informan yang secara konsisten memberikan respon negatif adalah Al Fred, yang juga merupakan satu-satunya informan yang secara tegas menganggap seluruh pembahasan politik di masjid sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara persepsi dan respon, meskipun terdapat variasi pada kasus Wisnu yang memberikan respon selektif.

Pengkategorian persepsi dan respon setiap informan dalam tabel di atas didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Informan dikategorikan menganggap ceramah bernuansa politik apabila dalam pernyataannya menyebut adanya penyebutan tokoh politik, ajakan memilih pihak tertentu, atau penggunaan bahasa yang identik dengan kepentingan politik praktis. Sebaliknya, informan dikategorikan tidak menganggap ceramah bernuansa politik negatif apabila mereka memaknai isi ceramah sebagai pembahasan nilai kepemimpinan, keadilan, dan amanah dalam kerangka moral Islam. Adapun respon dikategorikan positif apabila informan menyatakan setuju, mengapresiasi, atau menilai ceramah bermanfaat bagi kehidupan sosial, sedangkan respon negatif ditunjukkan melalui pernyataan ketidaksetujuan, keberatan terhadap konten ceramah, atau pandangan bahwa masjid seharusnya tidak digunakan untuk membahas politik. Khusus pada kasus Al Fred, indikator respon negatif yang paling menonjol adalah pernyataan tegas bahwa masjid seharusnya steril dari pembahasan politik dan kekhawatirannya bahwa ceramah politik berpotensi menjadikan masjid sebagai alat kekuasaan.

Respon Masyarakat terhadap Ceramah Agama Bernuansa Politik

Respon positif umumnya ditunjukkan oleh jamaah yang menganggap bahwa politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial umat. Informan Bapak Prof Arifinsyah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara sehingga pembahasan politik dalam masjid dianggap wajar selama bertujuan mendidik umat dan tidak memecah belah masyarakat. Menurutny, umat Islam justru harus memahami

politik agar tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu di luar nilai-nilai agama²⁶.

Jamaah bernama Bang Putra Ramadhan juga memberikan respon positif terhadap ceramah bertema politik yang membahas sejarah Dinasti Abbasiyah. Ia mengaku tertarik ketika penceramah menjelaskan hubungan antara politik, ekonomi, dan pendidikan dalam membangun kejayaan peradaban Islam²⁷. Respon positif seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima ceramah politik yang berpijak pada landasan historis dan keilmuan Islam dibandingkan ceramah yang bersifat provokatif atau mengarahkan pilihan politik secara langsung²⁸.

Selain respon positif, penelitian ini juga menemukan adanya respon negatif dari sebagian masyarakat. Beberapa jamaah merasa kurang nyaman ketika penceramah mulai menyinggung isu politik tertentu karena khawatir ceramah akan berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Kekhawatiran ini bukan semata-mata karena penolakan terhadap politik, melainkan karena takut adanya politisasi masjid sehingga dapat mengurangi fungsi utamanya sebagai ruang ibadah dan pemersatu umat dari berbagai latar belakang pilihan politik²⁹.

Hasil wawancara dengan Pak Kadus Samidi menunjukkan bahwa ceramah politik pernah memunculkan ketegangan kecil di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pernah ada warga yang merasa tersinggung setelah khutbah Jumat membahas pemimpin zalim sehingga dianggap menyindir calon tertentu dalam momentum pilkada. Selain itu, Pak Samidi juga menyebutkan bahwa pernah ada penceramah yang terlalu terang-terangan menyatakan bahwa memilih pemimpin non-religius adalah dosa, dan hal itu memicu sejumlah warga mengadu ke BKM. Kejadian-kejadian ini memperlihatkan

²⁶ Arifinsyah, "Wawancara Dengan Pak Arifinsyah" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

²⁷ Putra Ramadhan, "Wawancara Dengan Bang Putra Ramadhan" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

²⁸ Anton Sulaiman, "Komunikasi Politik Keagamaan Dalam Media Digital: Studi Pustaka Tentang Narasi Islam Dalam Kontestasi Wacana Publik," *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2025): 150–57.

²⁹ Harahap and Manurung, "Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik : Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam."

bahwa batas antara ceramah edukatif dan ceramah yang berpotensi memicu konflik sosial sangat tipis dan sangat bergantung pada diksi serta konteks situasi politik saat ceramah disampaikan³⁰.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa cara penyampaian penceramah memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan jamaah. Ceramah yang menggunakan bahasa santun, edukatif, dan tidak menyebut nama partai atau calon tertentu cenderung lebih diterima masyarakat. Sebaliknya, ceramah yang menggunakan bahasa provokatif atau terlalu mengarahkan pilihan politik jamaah cenderung memunculkan penolakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam komunikasi dakwah bahwa efektivitas pesan dakwah tidak hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi juga oleh kemampuan penceramah dalam memilih bahasa, konteks, dan cara penyampaian yang tepat agar pesan dapat diterima secara positif oleh jamaah³¹.

BKM Masjid Al Mubiin mengaku memiliki kebijakan tidak tertulis terhadap para penceramah, khususnya menjelang pemilu dan pilkada. Pengurus masjid memperbolehkan pembahasan politik selama bersifat edukatif dan tidak mengarah pada kampanye politik praktis. Kebijakan ini mencerminkan peran strategis BKM sebagai penjaga fungsi masjid, di mana pengurus tidak sekadar mengatur jadwal ceramah tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa konten ceramah tidak merusak harmoni sosial jamaah yang majemuk³².

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memengaruhi cara jamaah memahami ceramah politik. Jamaah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap isi ceramah dan mendukung. Sebaliknya, sebagian jamaah yang lebih tua atau memiliki tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih mudah mempercayai isi ceramah tanpa melakukan verifikasi tambahan dan ada yang menolak secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keagamaan dan literasi politik masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan kualitas penerimaan pesan dakwah di rumah ibadah³³.

³⁰ Samidi, "Wawancara Dengan Pak Samidi."

³¹ Arifin, *Komunikasi Politik Indonesia*.

³² Nasution, "Wawancara Dengan Pak Indra Fahmi Nasution."

³³ Arifinsyah, "Wawancara Dengan Pak Arifinsyah."

Selain pendidikan, pengalaman politik masyarakat juga memengaruhi respon terhadap ceramah agama bernuansa politik. Informan yang pernah mengalami konflik politik atau memiliki pengalaman buruk terhadap praktik politik cenderung lebih berhati-hati dalam menerima pembahasan politik di rumah ibadah. Sebaliknya, masyarakat yang melihat politik sebagai bagian dari perjuangan moral umat lebih terbuka terhadap ceramah bertema politik.

Keberagaman etnis masyarakat Bandar Khalipah yang terdiri dari etnis Jawa, Melayu, Mandailing, serta etnis lainnya turut memengaruhi dinamika persepsi jamaah. Masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya berbeda memiliki cara pandang yang tidak selalu sama terhadap hubungan agama dan politik. Dalam konteks masyarakat plural seperti Desa Bandar Khalipah, keberagaman interpretasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penceramah karena pesan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh kelompok etnis yang memiliki tradisi politik dan keagamaan yang berbeda.

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas jamaah sebenarnya tidak menolak pembahasan politik secara keseluruhan, melainkan menolak apabila masjid digunakan sebagai alat kampanye praktis. Sebagian besar informan masih menerima pembahasan politik selama berkaitan dengan nilai moral Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemimpin³⁴. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap ceramah politik tidak bersifat hitam-putih, melainkan sangat bergantung pada konteks, tujuan, dan cara penyampaian.

Arifinsyah dalam wawancara menjelaskan bahwa sejarah Islam menunjukkan adanya hubungan erat antara agama dan politik, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW dan Dinasti Abbasiyah. Pernyataan ini relevan sebagai landasan argumen bahwa ceramah politik di masjid bukan fenomena baru, melainkan memiliki akar historis dalam tradisi Islam³⁵. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat masa kini memaknai ceramah tersebut, bukan semata-mata bagaimana

³⁴ Ilham Ilyas, "Wawancara Dengan Bang Ilham Ilyas" (Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026).

³⁵ Arifinsyah, "Wawancara Dengan Pak Arifinsyah."

sejarah membenarkannya, karena penerimaan masyarakat terhadap ceramah tetap bergantung pada konteks sosial dan cara penyampaian yang aktual. Dalam konteks dakwah modern, ceramah agama memang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari persoalan sosial dan politik masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara agama dan politik dalam masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari strategi komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi opini publik melalui pendekatan moral dan simbolik³⁶. Dakwah pada hakikatnya tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pembahasan politik dalam ceramah sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran moral masyarakat selama tidak berubah menjadi propaganda politik praktis³⁷.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik sangat beragam dan berkaitan erat dengan respon yang diberikan jamaah. Pola yang dominan dari hasil *cross-tabulation* menunjukkan bahwa informan yang tidak memaknai ceramah sebagai sesuatu yang bernuansa politik negatif cenderung memberikan respon positif, sedangkan informan yang memaknai ceramah sebagai upaya politisasi masjid cenderung memberikan respon negatif. Faktor pendidikan, pengalaman sosial, cara penyampaian penceramah, keberagaman etnis, identitas dan situasi politik yang sedang berlangsung turut memengaruhi dinamika persepsi dan respon tersebut. Temuan ini memperkuat pentingnya penyampaian ceramah yang moderat, edukatif, dan tidak provokatif agar masjid tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang spiritual sekaligus ruang sosial yang mempersatukan umat seperti zaman Rasulullah.

Penutup

Penelitian di Masjid Al Mubiin Desa Bandar Khalipah mengungkapkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap ceramah agama bernuansa politik lebih ditentukan oleh kerangka persepsi

³⁶ Thorieq Al Abdu et al., "Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik: Dialektika Moral Politik Dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 474–95.

³⁷ Arifinsyah, "Wawancara Dengan Pak Arifinsyah."

individu yang terbentuk dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman keagamaan serta kepiawaian penceramah dalam memilih diksi. Jamaah yang memandang politik sebagai tanggung jawab moral keislaman cenderung menerimanya sebagai bentuk edukasi, sedangkan mereka yang mengaitkannya dengan kepentingan kekuasaan akan cenderung menolaknya. Menariknya, dalam masyarakat plural, keberagaman etnis tidak secara langsung memicu penolakan, sehingga mematahkan asumsi umum bahwa masyarakat majemuk pasti selalu sensitif terhadap isu politik. Temuan ini menegaskan bahwa masjid di lingkungan yang beragam tetap berpeluang menjadi ruang dakwah dan edukasi politik yang sehat, selama pesan disampaikan secara moderat, berfokus pada pencerahan moral, serta tegas dipisahkan dari kepentingan politik praktis.

Daftar Pustaka

- Abdu, Thorieq Al, Marzuki, Ayu Wantika, andre Selamat Sinaga, and Juni Yanti Siagian. "Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik:Dialektika Moral Politik Dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 474–95.
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Arifinsyah. "Wawancara Dengan Pak Arifinsyah." Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Avrizal, Muhammad. "Kecamatan Pasar Kemis Tentang Aplikasi Gojek Yang Dipergunakan Sebagai Media Berselingkuh" 1, no. 2 (2023).
- Efendi, Erwan Tri. "Pola Dan Strategi Dakwah Dalam Moderasi Beragama." *Da'watuna* 3, no. 2 (2023): 709–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2766>.
- Fikri, Miftakhul, and Hajidah Fildzahun Nadhilah K. "Masjid Sebagai

- Ruang Representasi Publik: Kajian Tentang Praktik Sosial Dan Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Dakwah* 23, no. 1 (2022).
- Fred, Al. “Wawancara Dengan Bang Al Fred.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Harahap, M Fahri, and Marzuki Manurung. “Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik : Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3495–3503.
- Iin Salsabila, Dinda Meiliani, Sabila Maharani, and Reza Noprial Lubis. “Desain Penelitian Studi Kasus.” *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika* 3, no. 3 (2025): 245–54. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i3.1937> .
- Ilmi, Muhammad Hafidz, and Muhammad Torieq Abdillah. “Mu A’s Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Fenomena Politisasi Mesjid Tinjauan Political Process Theory” 5, no. 2 (2023): 75–84. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i2.11884>.
- Ilyas, Ilham. “Wawancara Dengan Bang Ilham Ilyas.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Kontu, Fabiano Christian Adolf, Richard Luas, and Prishicha Tumewu. “Interaksi Antara Sensasi Dan Presepsi Dalam Pembentukan Pengalaman Manusia Di Lingkungan Sekitar.” *About PADAMARA: Jurnal Psikologi Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2026).
- Lisma. “Wawancara Dengan Buk Lisma.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Mudik, D I Kumun. “Persepsi Masyarakat Terhadap Humor Dalam Ceramah Juru Dakwah Di Kumun Mudik.” *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 29–50.
- Nasution, Indra Fahmi. “Wawancara Dengan Pak Indra Fahmi Nasution.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.

- Ramadhan, Putra. “Wawancara Dengan Bang Putra Ramadhan.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Salsabila, I., Meiliani, D., Maharani, S. M., & Lubis, R. “Desain Penelitian Studi Kasus.” *Jurnal Arjuna* 3, no. 3 (2025): 245–54.
- Samidi. “Wawancara Dengan Pak Samidi.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Serdang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli. “Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2024.” Deli Serdang, 2024. BPS Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2024.
- Sulaiman, Anton. “Komunikasi Politik Keagamaan Dalam Media Digital: Studi Pustaka Tentang Narasi Islam Dalam Kontestasi Wacana Publik.” *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2025): 150–57.
- Surpani, and Rumadi. “Dinamika Politik Islam Di Indonesia.” *DLALEKTIKA PUBLIK*, 2024.
- Suryana, Cecep. “Politik Sebagai Dakwah : Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. April (2021): 41–58.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12646>.
- Tri Setianingrum, Salsabilah. “Persepsi Masyarakat Tentang Komunikasi Yang Berdampak Pada Kinerja Organisasi Di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi.” Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, 2025.
<http://repository.stimbudibakti.ac.id/id/eprint/158>.
- Wismabrata, Michael Hangga. “Fakta Di Balik Ceramah Politik Saat Shalat Idul Fitri, Dipanggil Polres Dan Kodim Hingga Minta Maaf.” Kompas TV, 2019.
- Wisnu. “Wawancara Dengan Bang Wisnu.” Bandar Khalipah, Deli Serdang, 2026.

Yoan Colina. “Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Politisasi Agama Pada Pemilu 2024.” *Journal of Religious Policy* 3, no. 2 (2024): 277–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.44>.

Zahroh, Nur Intifada, Lusy Amelia Nasution, and Aulia Dzulfa Tazqia. “Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya.” *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.